

---

## PERAN JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH

Adrea Aptarizqu Elvaretta<sup>1</sup>, Fauziyah Ramadhani Baktiar<sup>2</sup>, Indah Prabawati<sup>3</sup>,  
Firre An Suprpto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Surabaya

[25040674299@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674299@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [25040674300@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674300@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>,

[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [firresuprpto@unesa.ac.id](mailto:firresuprpto@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

---

***ABSTRACT;** Social security and social protection in Indonesia now play a crucial role in government policies to eradicate poverty, reduce inequality, and maintain economic stability by providing basic necessities for a decent life. Social security and social protection in Indonesia currently focus on a "lifelong" approach, where policies are directed at comprehensive protection from birth to old age, covering health insurance, work accidents, old age, pensions, and death. This policy aims to reduce poverty and improve welfare through the National Social Security System (SJSN), which consists of five main programs managed by BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan, as well as social assistance such as PKH, BPNT, and KIP/KIS. This policy is crucial for household economic stability, but still faces challenges in terms of financing sustainability and coverage of the informal sector. However, the government continues to strive to integrate the system to make it more efficient and inclusive for all citizens. This article aims to discuss the role of social security and social protection in government policies and how these policies are crucial in facing challenges and improving public welfare. The method used in writing this article is a qualitative approach through a literature review of various relevant and accurate sources. The research results revealed important findings regarding the impact of social protection, namely the effectiveness of reducing.*

***Keywords:** Social Security, Social Protection, SJSN, Poverty, Public Welfare, Government Policy.*

**ABSTRAK;** Jaminan sosial dan perlindungan sosial di Indonesia sekarang berperan krusial dalam kebijakan pemerintah untuk menegat kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui penyediaan kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan dan perlindungan sosial di Indonesia saat ini berfokus pada pendekatan "sepanjang hayat" dimana kebijakan diarahkan pada perlindungan menyeluruh dari lahir hingga lansia, mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian, yang bertujuan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan

kesejahteraan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang terdiri dari lima program utama yang dikelola oleh BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan serta bantuan sosial seperti PKH, BPNT, KIP/KIS. Kebijakan ini krusial dalam stabilitas ekonomi rumah tangga, tetapi masih menghadapi tantangan keberlanjutan pembiayaan dan cakupan sektor informal. Namun, pemerintah terus berupaya mengintegrasikan sistem agar lebih efisien dan inklusif bagi seluruh warga negara. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran jaminan sosial dan perlindungan sosial dalam kebijakan pemerintah serta bagaimana kebijakan tersebut menjadi hal yang krusial dalam menghadapi tantangannya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan dan akurat. Pada hasil penelitian ditemukan temuan penting terhadap dampak perlindungan sosial yaitu adanya efektivitas penurunan kemiskinan, stabilitas ekonomi rumah tangga, kesejahteraan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan perlindungan yang adaptif.

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial, SJSN, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Pemerintah.

## **PENDAHULUAN**

Kesenjangan ekonomi merupakan ketidakseimbangan sosial yang mencolok, di mana kelas atas memiliki kedudukan dan kuasa yang jauh lebih tinggi daripada kelas miskin menurut Abad Badruzaman (2009). Hal itu cenderung menimbulkan ketimpangan dan masalah kemiskinan. kedua hal tersebut menjadi tantangan struktural yang utama, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan jaminan dan perlindungan sosial yang masif. Data menunjukkan adanya kerentanan kelas menengah yang turun menjadi menjadi miskin dan ketimpangan yang masih tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun, setiap negara memiliki kebijakan dan strategi masing-masing dalam mengatasi masalah negaranya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai skema telah dilakukan pemerintah, yaitu dengan adanya program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin yang mencakup sepanjang hayat (balita, anak usia sekolah, usia produktif dan lansia) termasuk didalamnya kelompok penyandang disabilitas.

Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai program yang bertujuan memberikan perlindungan sosial

dan menjamin masyarakatnya. Jaminan dan perlindungan sosial berperan krusial dalam kebijakan pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan, dan menjamin kehidupan layak melalui SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi perlindungan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SJSN) menjadikan dasar hukum atau pengaturan terkait dengan penerapan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 UU SJSN menyebutkan Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan permasalahan kesejahteraan seperti jatuh sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Kemudian Pasal 5 Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang melaksanakan kebijakan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial (selanjutnya disebut dengan UU BPJS).

Berdasarkan Pasal 5 UU BPJS menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kebersertaan atau pemberlakuan sistem jaminan sosial nasional kesehatan atau yang disebut dengan jaminan kesehatan nasional mencakup seluruh rakyat Indonesia mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian pelayanan BPJS sebagaimana Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa ketentuan Pasal 6 UU BPJS diubah menjadi:

- 1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- 2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
  - a. jaminan kecelakaan kerja
  - b. jaminan hari tua
  - c. jaminan pensiun

- d. jaminan kematian
- e. jaminan kehilangan pekerjaan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa jaminan sosial dan perlindungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran jaminan sosial dan perlindungan sosial dalam kebijakan pemerintah serta pentingnya kedua aspek tersebut dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan terlindungi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara konseptual mengenai peran jaminan sosial dan perlindungan sosial dalam kebijakan pemerintah melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, teori, serta kebijakan yang berkaitan dengan jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku ilmiah, jurnal akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan jaminan sosial dan perlindungan sosial. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan pemerintah yang relevan juga dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih merupakan sumber-sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan pembahasan mengenai jaminan sosial, perlindungan sosial, serta kebijakan pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam proses ini, peneliti mengkaji dan menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari literatur yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian disusun dan dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran jaminan sosial dan perlindungan sosial dalam kebijakan pemerintah. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya jaminan sosial dan perlindungan sosial sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kebijakan jaminan sosial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Program bantuan tunai seperti BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan langsung tunai desa. Program tersebut membantu memenuhi kebutuhan pokok, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Program jaminan kesehatan memungkinkan masyarakat memperoleh akses layanan medis yang lebih mudah dan terjangkau, sehingga risiko penyakit dan biaya kesehatan yang tinggi dapat diminimalkan. Selain itu, program pensiun dan tunjangan sosial memberikan perlindungan bagi kelompok lanjut usia dan pekerja informal, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih aman dan layak.

Meskipun memberikan manfaat signifikan, kebijakan jaminan sosial juga menghadapi berbagai tantangan. Akurasi data penerima bantuan sosial masih rendah, menyebabkan inclusion error (orang mampu menerima) dan exclusion error (orang miskin tidak menerima), yang pada akhirnya integrasi dan pemutakhiran data sektoral (seperti DTKS) yang lambat sering kali tidak mampu mengikuti dinamika perubahan ekonomi Masyarakat secara cepat. BPJS ketenagakerjaan menghadapi tantangan besar dalam memperluas cakupan pekerja informal (bukan penerima upah) yang jumlahnya mendominasi angkatan kerja di Indonesia, dimana kelompok pekerja informal rentan seringkali memiliki kapasitas ekonomi terbatas untuk membayar iuran mandiri secara konsisten. Program perlindungan sosial, khususnya BPJS Kesehatan (PBI) dan bantuan tunai, menuntut anggaran yang besar dan berisiko memberatkan APBN di Tengah target

penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Hal tersebut menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan melebihi tingkat inflasi umum, yang membebani keberlanjutan jaminan kesehatan nasional. Keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil menghambat efektivitas penyaluran bantuan dan pendaftaran kepersertaan jaminan, hal itu menyebabkan kualitas fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS masih belum merata antara wilayah barat dan timur Indonesia. Indonesia menuju struktur penduduk lansia (*ageing society*) yang membutuhkan peningkatan jaminan pensiun dan layanan perawatan jangka Panjang (*long-term care*) yang menyebabkan perlindungan sosial harus adaptif terhadap bencana alam, yang seringkali menjadi pemicu kemiskinan baru.

## **KESIMPULAN**

Jaminan sosial dan perlindungan sosial memiliki peran krusial dalam kebijakan pemerintah Indonesia untuk menegras kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Melalui pendekatan “sepanjang hayat” yang diwujudkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan menyeluruh dari lahir hingga lansia melalui lima program utama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan KIP/KIS.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan jaminan dan perlindungan sosial terbukti efektif menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta memberikan rasa aman bagi kelompok rentan, termasuk lansia dan pekerja informal. Program tersebut berkontribusi langsung pada stbilitas ekonomi rumah tangga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, di antaranya akurasi data penerima yang rendah, cakupan pekerja sektor informal yang terbatas, beban pembiayaan yang besar terhadap APBN, ketimpangan infrastruktur dan kualitas layanan kesehatan antarwilayah, serta tuntutan untuk adaptif terhadap perubahan struktur demografi menuju *ageing society* dan kerentangan terhadap bencana.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk mengintegrasikan sistem, memutakhirkan data secara dinamis, memperluas kepersertaan

sektor informal, memperkuat keberlanjutan pembiayaan, dan pemerataan infrastruktur digital serta layanan kesehatan. Dengan penguatan aspek tersebut, jaminan sosial dan perlindungan sosial dapat berfungsi secara lebih efisien, inklusif, dan adaptif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

Agribisnis Digital FKP UNESA. (2025, November 9). Dampak kebijakan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

<https://agridigi.fkp.unesa.ac.id/post/dampak-kebijakan-jaminan-sosial-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-diindonesia#:~:text=Pelaksanaan%20kebijakan%20jaminan%20sosial%20memberikan,dan%20meningkatkan%20daya%20beli%20masyarakat.>

Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila. (2025). Analisis faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bansos kepada masyarakat miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 394-404.

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1402/1539#:~:text=Akibatnya%2C%20data%20yang%20digunakan%20dalam%20penyaluran%20bantuan,yang%20tidak%20berhak%20justru%20terdaftar%20sebagai%20penerima.>

Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas. (n.d.). *Perlindungan sosial di indonesia: Tantangan dan arah ke depan* [PDF]. Kementerian PPN/Bappenas.

[https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit\\_Kerja/Deputi\\_Bidang\\_Kependudukan\\_dan\\_Ketenagakerjaan/Direktorat-Kependudukan-Jaminan-Sosial/Perlindungan%20Sosial%20di%20Indonesia%20-%20Tantangan%20dan%20Arah%20ke%20Depan.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Kependudukan_dan_Ketenagakerjaan/Direktorat-Kependudukan-Jaminan-Sosial/Perlindungan%20Sosial%20di%20Indonesia%20-%20Tantangan%20dan%20Arah%20ke%20Depan.pdf)

GOBankingRates. (n.d.). 3 biggest problems facing Social Security. Yahoo Finance.

<https://finance.yahoo.com/news/3-biggest-problems-facing-social-161425808.html#:~:text=One%20big%20problem%20is%20that,overall%20inflation%2C%E2%80%9D%20Benton%20said.>

Ikhsan, M., Muliana, H., & Wahab, S. (2021). Penyelenggaraan sistem jaminan nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *SOL JUSTICIA*, 4(2), 141-150.

<https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/download/457/314>

- International Labour Organization. (n.d.). Indonesia identifies seven strategic issues for its Road Map and Action Plan on Care Economy. <https://www.ilo.org/resource/news/indonesia-identifies-seven-strategic-issues-its-road-map-and-action-plan>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024, 4 Maret). Ini ragam upaya pemerintah untuk tingkatan kesejahteraan sosial. <https://www.kemerkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial#:~:text=Selain%20program%20bantuan%20sosial%2C%20pemerintah,sosi al%20ketenagakerjaan%20yang%20didalamnya%20juga>
- MABES-PKRI. (n.d.). Pemerintah terus memperkuat perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan menyiapkan anggaran 493... . <https://mabes-pkri.or.id/pemerintah-terus-memperkuat-perlindungan-dan-jaminan-sosial-bagi-masyarakat-dengan-menyiapkan-anggaran-493->
- Mudiyono. (2002). Jaminan sosial di Indonesia: Relevansi pendekatan informal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 67-78. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/download/11094/8335>
- Nawawi, A. (2021). Arah kebijakan perlindungan sosial ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10). <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/329/519#:~:text=Hasil%20penelitian%20menemukan%20bahwa%20kebijakan%20perlindungan%20sosial,perlindungan%20sosial%20untuk%20semua%20dan%20sepanjang%200hayat>.
- OCBC. (2022, 3 Januari). BPJS adalah. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/01/03/bpjs-adalah> Resilience Development Initiative. (n.d.). Adaptive social protection (ASP). <https://rdiglobal.org/knowledge-hub/adaptive-social-protection-asp>
- The SMERU Research Institute. (n.d.). Melindungi kelompok paling rentan di perdesaan Indonesia: Bagaimana kita dapat?. <https://smeru.or.id/id/research-id/melindungi-kelompok-paling-rentan-di-perdesaan-indonesia-bagaimana-kita-dapat#:~:text=Salah%20satunya%2C%20kebijakan%20yang%20ada%20belum%20mempertimbangkan,negara%20yang%20sangat%20rentan%20terhadap%20ben cana%20alam>.

Timedoor. (2005). Realitas kemiskinan di Indonesia 2026: Jurang desa-kota & solusi.

<https://id.timedoor.net/blogs/kemiskinan-di-indonesia/>.